Analisis Pragmatik Tindak Tutur Ilokusi dalam Video Tempo.co Edisi 22 Maret 2025 tentang Revisi UU TNI

Siti Afifatur Rohmah¹

Joko Widodo²

Hari Windu Asrini³

¹²³Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

¹afifarohmah732@gmail.com

²joko_w@umm.ac.id

³hariwindu@umm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pragmatik tindak tutur ilokusi dalam video Tempo.co edisi 22 Maret 2025 tentang Revisi UU TNI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menganalisis transkrip percakapan dari video untuk diidentifikasi jenis-jenis tindak tutur ilokusi yang dominan. Hasil penelitian menunjukkan adanya lima jenis tindak tutur ilokusi, yaitu asertif (menyatakan, melaporkan, mengklaim), direktif (memerintah, meminta, menasihati), komisif (berjanji, mengancam, menawarkan), ekspresif (mengucapkan terima kasih, meminta maaf, mengeluh), dan deklaratif (membaptis, menyatakan perang, memberhentikan). Analisis mendalam pada setiap jenis tindak tutur ilokusi dalam konteks perbincangan para tokoh terkait Revisi UU TNI memberikan pemahaman tentang bagaimana bahasa digunakan secara strategis untuk menyampaikan informasi, kritik, sindiran, serta mempengaruhi opini publik terkait isu politik dan hukum yang sensitif ini. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pragmatik tindak tutur ilokusi berperan dalam diskursus publik mengenai isu-isu penting kenegaraan.

Kata Kunci: *Pragmatik, Tindak Tutur, Ilokusi, Revisi UU TNI, Analisis Wacana, Tempo.co.*

Pendahuluan

Bahasa memiliki peran penting dalam menyampaikan ide, membentuk opini, dan mempengaruhi cara pandang masyarakat. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Komunikasi memegang peran yang penting dalam setiap kehidupan (Putri dan Utomo, 2021). Dalam interaksi, manusia membutuhkan bahasa sebagai media menyampaikan informasi. Selaras dengan yang disampaikan oleh Wulandari dan Utomo (2021), manusia melakukan komunikasi dengan lawan bicaranya, hal ini disebut dengan tindak tutur.

Pentingnya bahasa tidak hanya sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai cerminan pola pikir, budaya, dan ideologi. Melalui bahasa, seseorang tidak hanya menyampaikan maksud, tetapi juga dapat mempengaruhi dan membentuk pola pikir orang lain. Bahasa memiliki kekuatan retorik untuk membentuk wacana publik, menciptakan persepsi, serta menggerakkan tindakan sosial. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang tepat dan kontekstual menjadi krusial dalam setiap bentuk komunikasi.

Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang berfokus pada hubungan antara konteks luar bahasa dengan tuturan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kridalaksana (2008), pragmatik adalah ketetapan yang menyebabkan keselarasan penggunaan bahasa di dalam sebuah komunikasi, yakni bahasa atau konteks luar bahasa

yang memiliki peran serta dalam arti ujaran. Artinya, keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh struktur kalimat, tetapi juga oleh pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi tuturan tersebut.

Menurut Austin, tindak tutur dibagi menjadi tiga, yakni tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi (Akbar, 2018). Salah satu yang menjadi objek penelitian dalam pragmatik adalah tuturan. Tindak tutur merupakan suatu tindakan yang mengaitkan sesuatu dengan lawan bicara. Melalui pendekatan pragmatik, kita dapat memahami makna implisit dari sebuah ujaran, serta bagaimana bahasa digunakan secara strategis untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu.

Dalam kajian pragmatik, tindak tutur (*speech act*) merupakan salah satu konsep utama yang digunakan untuk memahami bagaimana bahasa dipakai secara nyata dalam konteks komunikasi. Tindak tutur menunjukkan bahwa penggunaan bahasa tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan sosial, seperti meminta, berjanji, menyindir, memerintah, dan sebagainya. Dengan kata lain, setiap ujaran yang diucapkan memiliki fungsi tertentu yang dapat memengaruhi sikap atau tindakan lawan bicara.

Analisis tindak tutur dalam pragmatik membantu menjelaskan bagaimana makna dan fungsi suatu ujaran ditentukan oleh konteks situasi, niat penutur, serta respons pendengar. Artinya, pemahaman terhadap suatu tuturan tidak hanya bergantung pada struktur bahasa, tetapi juga pada hubungan sosial, tujuan komunikatif, dan norma yang berlaku dalam interaksi.

Sejalan dengan pendapat Richard dalam Purba (2011), tindak tutur merupakan unit terkecil dalam penggunaan peristiwa tutur yang mengandung fungsi tertentu dalam komunikasi. Dalam praktik komunikasi sehari-hari, baik penutur maupun mitra tutur umumnya berupaya agar tuturan yang disampaikan sesuai dengan konteks, mudah dipahami, singkat, dan relevan dengan topik pembicaraan. Hal ini bertujuan agar proses komunikasi berjalan efektif dan efisien, serta tidak membuang waktu dalam berinteraksi (Hidayah dan Sudrajat, 2020).

Analisis pragmatik terhadap tindak tutur dalam video merupakan langkah penting untuk memahami bagaimana informasi disampaikan, baik secara eksplisit maupun implisit. Analisis ini tidak hanya menyoroti makna literal suatu ujaran, tetapi juga menggali maksud tersembunyi yang berkaitan dengan konteks, tujuan penutur, dan interpretasi pendengar. Penelitian ini menjadi relevan karena dalam praktik komunikasi publik, bahasa sering digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meyakinkan audiens, menyampaikan kritik secara halus, atau bahkan menyindir pihak tertentu.

Sebagai contoh, dalam isu Revisi UU TNI, terdapat dugaan bahwa perubahan tersebut mengakomodasi berbagai kepentingan politik, termasuk adanya "pesanan khusus" dari Prabowo Subianto. Fenomena ini menambah kompleksitas dalam menafsirkan ujaran-ujaran yang muncul di ruang publik, karena tuturan yang disampaikan tidak selalu langsung, melainkan sarat dengan makna pragmatis dan strategi komunikasi.

Dalam situasi seperti ini, peran bahasa santun menjadi sangat penting. Penutur dan mitra tutur diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai konteks agar tercipta komunikasi yang baik. Bahasa santun mampu membangun suasana yang nyaman, harmonis, dan kondusif antara kedua belah pihak dalam interaksi (Anggraeni & Utomo, 2021). Sejalan dengan pendapat Urbaningrum dkk. (2022), tindak tutur berperan penting sebagai jembatan antara perilaku sosial dan bentuk bahasa yang digunakan dalam komunikasi. Dua penelitian menunjukkan bahwa tindak tutur ilokusi dalam media podcast mencakup beragam jenis, dengan tindak tutur asertif sebagai

bentuk yang paling dominan. Penelitian Widyawati dan Asep (2020) mengidentifikasi lima jenis tindak tutur dengan dominasi asertif, sementara penelitian oleh Kristianingsih, Astuti, dan Tiani (2023) menemukan empat jenis tindak tutur tanpa menyertakan deklaratif. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam podcast lebih banyak digunakan untuk menyampaikan informasi, pendapat, dan ekspresi pribadi, dibanding menyatakan keputusan resmi.

Teori tindak tutur yang dikemukakan oleh J.L. Austin (1962) dan selanjutnya dikembangkan oleh John Searle (1969) merupakan landasan teoretis utama dalam penelitian ini. Seiring dengan perkembangannya, teori tindak tutur oleh Austin, Searle mengelompokkan tindak tutur ilokusi menjadi lima jenis. Pertama, asertif mencerminkan keyakinan penutur terhadap kebenaran suatu pernyataan, seperti dalam menyatakan atau melaporkan. Kedua, direktif bertujuan memengaruhi pendengar agar melakukan tindakan tertentu, yakni tindakan memerintah atau menasihati. Ketiga, komisif menunjukkan komitmen penutur terhadap suatu tindakan di masa depan, seperti berjanji atau menawarkan. Keempat, ekspresif mengungkapkan perasaan atau sikap batin penutur, seperti berterima kasih atau mengeluh. Terakhir, deklaratif merupakan tuturan yang mampu mengubah situasi atau status secara langsung, seperti menyatakan perang atau memberhentikan seseorang.

Kajian tindak tutur ilokusi berakar pada teori yang dikembangkan oleh Austin (1962) dan diperluas oleh Searle (1979), yang menjelaskan bahwa dalam setiap ujaran terdapat tindakan yang dilakukan penutur. Searle membagi tindak tutur ilokusi ke dalam lima kategori, yaitu representatif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Masing-masing bentuk ini memiliki fungsi komunikatif yang beragam, tergantung pada maksud penutur dan respons yang diharapkan dari pendengar.

Dalam konteks komunikasi politik, tindak tutur ilokusi sangat relevan karena bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membentuk opini, meyakinkan publik, serta menunjukkan posisi ideologis tertentu. Seperti yang dijelaskan oleh van Dijk (1997), diskursus politik sarat dengan strategi bahasa yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan mempengaruhi khalayak. Oleh karena itu, wacana dalam media massa, khususnya video diskusi dari Tempo.co mengenai Revisi UU TNI, dapat dianalisis secara mendalam melalui pendekatan tindak tutur ilokusi karena mengandung berbagai strategi komunikasi dari aktor-aktor penting seperti pejabat pemerintah, anggota legislatif, dan militer.

Media massa memiliki peran penting dalam membingkai isu-isu strategis, termasuk Revisi UU TNI. Menurut Eriyanto (2012), media bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk realitas sosial melalui pilihan kata, narasi, dan struktur wacana. Dalam video Tempo.co yang diunggah pada 22 Maret 2025, terlihat bagaimana bahasa digunakan secara strategis oleh para tokoh untuk membela, menyanggah, atau menawarkan solusi terkait revisi undang-undang, yang mencerminkan bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi secara nyata.

Penelitian mengenai tindak tutur ilokusi telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, terutama dalam konteks komunikasi antarpribadi, pembelajaran bahasa, maupun interaksi di media sosial. Persamaan penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya terletak pada fokus kajiannya terhadap tindak tutur ilokusi, yaitu bagaimana ujaran merepresentasikan maksud dan tindakan sosial penutur. Namun, yang membedakan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah pada objek kajiannya, yaitu penggunaan video jurnalistik dari Tempo.co edisi 22 Maret 2025 tentang Revisi UU TNI sebagai sumber data utama.

Kajian ini dilakukan dalam kerangka pragmatik, khususnya analisis tindak tutur ilokusi yang mencakup kategori representatif, direktif, komisif, dan ekspresif sebagaimana dikemukakan oleh Searle (1979). Video tersebut memuat berbagai pernyataan dari tokoh-tokoh penting seperti pejabat pemerintah, anggota DPR, dan perwakilan TNI, yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membujuk, menyindir, menegaskan posisi politik, dan membentuk opini publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi yang muncul dalam diskursus video tersebut, sekaligus menelaah bagaimana strategi kebahasaan digunakan secara kontekstual untuk mencapai tujuan komunikatif tertentu dalam ranah politik dan hukum.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif sesuai fenomena kebahasaan yang diamati. Sumber data yang digunakan adalah tayangan video Tempo.co. Data penelitian adalah transkrip percakapan dari video Tempo.co edisi 22 Maret 2025 yang berjudul "Revisi UU TNI". Video ini dipilih karena secara eksplisit membahas isu revisi UU TNI dan melibatkan berbagai narasumber dengan perspektif yang berbeda. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan. Data-data yang terdapat di dalam penelitian ini berisikan tuturan atau percakapan dari beberapa bagian video Tempo.co edisi 22 Maret 2025 yang berjudul "Revisi UU TNI". Data-data berupa percakapan tersebut yang akan dianalisis dan dideskripsikan nantinya. Subjek dari penelitian ini adalah tayangan video Tempo.co edisi 22 Maret 2025 yang berjudul "Revisi UU TNI".

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi, simak, dan catat. Langkah-langkah dalam pengumpulan data menggunakan teknik simak catat yang peneliti lakukan, yaitu 1) mencari dan mengumpulkan sumber data penelitian dari video Tempo.co edisi 22 Maret 2025 yang berjudul "Revisi UU TNI", 2) menonton dan menyimak tayangan video Tempo.co edisi 22 Maret 2025 yang berjudul "Revisi UU TNI", 3) mencatat tuturan atau perkataan dalam video Tempo.co edisi 22 Maret 2025 yang berjudul "Revisi UU TNI", 4) mengelompokkan data sesuai yang dibutuhkan, untuk dianalisis nantinya, 5) melakukan analisis data dengan mencari bentuk tindak tutur ilokusi dalam tayangan video tersebut.

Hasil

Hasil dan Pembahasan Berdasarkan analisis pragmatik tindak tutur ilokusi video Tempo.co edisi 22 Maret 2025 yang berjudul "Revisi UU TNI" telah ditemukan sebanyak 54 tindak tutur yang terbagi ke dalam lima jenis tindak tutur ilokusi, yakni pertama, tindak tutur ilokusi asertif (representatif) terdapat 16 tindak tutur. Kedua, tindak tutur ilokusi direktif terdapat 13 tindak tutur. Ketiga, tindak tutur ilokusi komisif terdapat 5 tindak tutur. Keempat, tindak tutur ilokusi ekspresif terdapat 6 tindak tutur. Kelima, tindak tutur ilokusi deklaratif terdapat 14 tindak tutur. Berikut hasil analisis pragmatik tindak tutur ilokusi video Tempo.co edisi 22 Maret 2025 yang berjudul "Revisi UU TNI".

Tindak Tutur Asertif (Representatif)

Data 1

Konteks tuturan yang terjadi antara Stefanus Pramono dan Husein Abri.

"Revisi Undang-Undang TNI ini juga ada pesanan khusus dari Prabowo untuk posisi tertentu"

Pernyataan ini menyampaikan klaim atau informasi bahwa revisi RUU TNI didasari atas "pesanan khusus" dari Prabowo. Pendekatan ini menganggap argumen sebagai bagian dari tindak tutur (*speech act*) yang memiliki efek illokusi (tujuan) dan perubahan kewenangan. Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Naila dkk. (2024) dalam kampanye media sosial, penyusunan elemen visual dan teks diarahkan untuk menonjolkan citra politik tertentu. Hal tersebut ditegaskan kembali bahwa istilah seperti "pesanan khusus" jelas merupakan strategi framing yang bertujuan menarik perhatian pengguna dan memengaruhi persepsi. Tindak tutur ini menyampaikan opini atau dugaan pribadi sebagai fakta, meskipun kebenarannya belum tentu objektif. Pernyataan ini merupakan pernyataan informatif yang memberikan informasi tentang adanya pengaruh dari pihak tertentu. Pengaruh yang dimaksud dalam hal ini Prabowo dalam proses revisi Undang-Undang TNI. Penutur ingin memberitahukan audiens tentang adanya dugaan pengaruh dari Prabowo terhadap revisi tersebut. Pernyataan ini dibuat seolah-olah berupa fakta yang tidak perlu dipertanyakan. Penyebutan nama Prabowo digunakan untuk membentuk opini publik tentang adanya politisasi atau kepentingan pribadi di balik adanya revisi undang-undang TNI. Istilah "pesanan khusus dari Prabowo" dirancang untuk menarik perhatian audiens yang memiliki ketidakpercayaan terhadap Prabowo. Dalam kerangka analisis pragmatik, hal ini memperlihatkan bahwa setiap tuturan harus ditelaah tidak hanya dari makna literalnya, tetapi juga dari konteks, maksud komunikatif, serta potensi dampak sosial-politiknya.

Data 2

Konteks tuturan yang terjadi antara Stefanus Pramono dan Fransisca christy rosana

"Balek itu sekarang kan pabrik undang-undang cepat. Iya, biar cepat dan biar murah."

Pernyataan ini sebagai bentuk kritikan atau sindiran proses legislasi yang dianggap terlalu tergesa-gesa dan dangkal. Fransisca secara tegas menyampaikan dalam diskusi atau talk show dengan nada yang menyindir. Istilah "pabrik" dan "murah" menyiratkan kritik bahwa legislasi dilakukan seperti produksi massal, bukan proses demokratis yang bermutu, suatu bentuk sarkastik atau sinis. Kritikan ini mengisyaratkan bahwa legislasi tidak transparan dan tidak demokratis. Pernyataan ini bisa memicu reaksi dari publik atau pembaca untuk menggali lebih dalam dan menilai apakah benar ada pengaruh dari Prabowo dalam revisi tersebut. Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Ramadhani, dkk., (2025) menunjukkan bagaimana satire dan sarkasme di media digital digunakan untuk mengkritik kebijakan pemerintah secara halus dengan kontras ironis dan retorika tangan tajam. Konsep "pabrik undang-undang cepat" sejalan dengan strategi pragmatic sarkasme. Dengan demikian pernyataan tersebut bisa menjadi alat untuk membentuk atau mengubah opini publik.

Data 3

Konteks tuturan yang terjadi antara Stefanus Pramono dan Husein Abri.

"Pasal itu juga menurut sebelah narasumber merupakan pasal gula-gula untuk menangkis tudingan bahwa TNI ini bisa masuk ke mana-mana."

Pernyataan ini muncul dalam diskusi mengenai revisi undang-undang TNI. Hal ini menjadi kekhawatiran masyarakat sipil mengenai potensi perluasan kewenangan dan peran TNI dalam berbagai sektor. Husein tidak hanya sebatas mengungkapkan fakta, tetapi juga memberikan interpretasi terhadap fungsi pasal tersebut. Istilah "gula-gula" memiliki konotasi sesuatu yang menarik atau manis di permukaan, namun mungkin tidak memiliki substansi mendalam atau bahkan bersifat manipulatif. Pernyataan ini sebuah bentuk meyakinkan yang terdapat dalam frasa "merupakan pasal gula-gula", pernyataan Husein menunjukkan sebuah keyakinan terhadap interpretasi tersebut. Ia meyakini bahwa pasal itu dibuat sebagai respons defensif terhadap kritik atau kekhawatiran publik. Penggunaan istilah "gula-gula" secara implisit menyiratkan bahwa pasal tersebut mungkin tidak mengatasi akar permasalahan atau kekhawatiran yang sebenarnya. Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Charoensukmongkol dan Liu (2022) menunjukkan bahwa penggunaan metafora "gula-gula" dalam wacana politik berfungsi sebagai strategi retorik yang menyembunyikan narasi hati-hati di balik bahasa yang ringan, namun kuat dalam membentuk persepsi publik terhadap kebijakan. Metafora ini menimbulkan kesan bahwa sesuatu mungkin "manis" di permukaan tapi kosong atau manipulatif (retorika implisit). Kekuatan ilokusi dari pernyataan ini terletak pada kemampuannya untuk mempengaruhi persepsi pendengar terhadap pasal yang dibahas. Dengan menggunakan metafora "gula-gula", Husein berhasil menyampaikan pandangannya secara ringkas dan mudah dipahami, sekaligus membangkitkan kewaspadaan terhadap potensi tujuan tersembunyi di balik pasal tersebut.

Tindak Tutur Direktif

Data 4

Konteks tuturan yang terjadi antara Stefanus Pramono dan Husein Abri.

Stefanus Pramono: "*Siapa sebenarnya dibalik revisi undang-undang TNI ini,?*"

Husein Abri: "*Depannya P belakangnya O, Pramono Prabowo Subianto*"

Pernyataan ini berupa kalimat tanya. Kalimat tanya yang dimaksud fungsi utamanya bukan untuk mencari sebuah jawaban tetapi untuk mengajak atau mengarahkan audiens agar menyimpulkan sendiri siapa sosok yang dimaksud. Hal ini menjadi ciri utama tindak tutur ilokusi direktif, yaitu mengarahkan perilaku atau pemikiran pendengar. Frasa "depannya P belakangnya O" adalah teknik penyamaran atau penyampaian sindiran yang sengaja tidak menyebut nama langsung. Namun, dengan tambahan "Pramono Prabowo Subianto" di akhir kalimat, penyamaran itu segera dibuka secara langsung. Strategi ini digunakan untuk menggiring audiens berpikir kritis sehingga mampu menghubungkan petunjuk itu dengan tokoh yang dimaksud, serta audiens mampu menyimpulkan bahwa Prabowo lah sosok yang dimaksud. Dalam ujaran politik, pertanyaan retorik dan petunjuk samar memiliki ilokusi persuasi untuk mengarahkan pemikiran audiens (Taguchi dan Kadar, 2025).

Data 5

Konteks tuturan yang terjadi antara Stefanus Pramono dan Fransisca Christy Rosana

"*Jangan dilempar lagi ya dikirim-kirimin kirim-kirim.*"

Pernyataan ini mengandung bentuk larangan dan perintah, yang secara eksplisit mengarahkan lawan bicara atau pihak yang dibicarakan untuk berhenti mengalihkan tanggung jawab. Tindak tutur direktif bertujuan untuk mengarahkan atau memengaruhi tindakan pendengar. Dalam hal ini, frasa "jangan dilempar lagi" adalah bentuk larangan langsung. Kalimat ini mengandung harapan atau tuntutan agar masalah tidak terus-

menerus “dilempar” kepada pihak lain tetapi harus ditangani. Ungkapan “dilempar” dan “kirim-kirimin” adalah metafora yang mengacu pada bentuk praktik birokrasi atau pengambilan keputusan politik yang berarti saling melempar tanggung jawab. Penggunaan pengulangan seperti “kirim-kirimin kirim-kirim” mencerminkan kekesalan atau sindiran terhadap pola komunikasi yang tidak produktif, yang hanya berputar tanpa penyelesaian. Lee dkk. (2022) menegaskan bahwa dalam konteks politik, perintah yang dikemas dengan gaya kasual (“jangan... kirim-kirimin”) merupakan bentuk mitigated directive untuk menjaga hubungan interpersonal sambil tersirat kuat memberi perintah. Ini memperkuat nada perintah untuk menghentikan sikap saling mengalihkan masalah. Kalimat ini menggunakan gaya tutur santai tapi tegas, mungkin ditujukan untuk menegur dengan cara yang tetap komunikatif namun tetap menyampaikan urgensi. Kata “ya” di tengah kalimat memberikan kesan interpersonal yang ringan, tapi tetap bermakna desakan atau teguran sopan. Dalam konteks diskusi publik atau media seperti “Bocor Alus Politik”, gaya bahasa seperti ini biasa dipakai untuk menghindari tuduhan langsung, tetapi tetap menyampaikan pesan yang kuat dan kritis. Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Al-Deen dkk., 2024 bahwa penggunaan metafora, pengulangan, dan gaya santai menjadi bentuk direktif tidak langsung yang efektif memicu respons publik. Hal ini memperkuat fungsi direktifnya, karena pembicara tidak hanya menginformasikan, tetapi juga mengajak audiens untuk mencurigai, mempertanyakan, atau menyelidiki lebih lanjut siapa yang berada di balik revisi.

Tindak Tutur Komisif

Data 6

Konteks tuturan yang terjadi antara Stefanus Pramono dan Husein Abri.

"Prabowo ingin merevisi ini sih karena Prabowo ini melihat undang-undang yang lama sudah usang."

Pernyataan ini membuktikan akan komitmennya untuk merevisi undang-undang yang sudah usang. Pernyataan ini adalah komitmen untuk melakukan perubahan atau pembaharuan terkait undang-undang yang ada, yang merupakan bentuk tindak tutur komisif karena menyatakan niat untuk bertindak dalam waktu yang akan datang. Pernyataan ini kemungkinan disampaikan saat wawancara media. Pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat. Hal ini juga menjadi dasar penilaian publik terhadap komitmen Prabowo dalam melaksanakan janji-janjinya.

Tindak Tutur Ekspresif

Data 7

Konteks tuturan yang disampaikan oleh Husein Abri.

"Sebenarnya kan ya kalau itu kan kita disalah-salahkan gitu ya bahwa eh apa Kemenhan mau untuk mendengarkan gitu ya..."

Pernyataan ini termasuk tindak tutur ekspresif karena menyampaikan perasaan pribadi pembicara, yaitu perasaan frustrasi, keberatan, atau tidak nyaman akibat adanya tuduhan atau kesalahpahaman. Tindak tutur ekspresif digunakan untuk mengungkapkan sikap psikologis atau emosi pembicara terhadap situasi tertentu. Dalam kutipan ini, frasa “kita disalah-salahkan” mencerminkan perasaan keberatan atau frustrasi karena pembicara merasa pihaknya dituduh secara tidak adil. Ini menandakan adanya ketegangan emosional yang muncul dari rasa tidak dimengerti atau disudutkan. Ucapan ini menyiratkan bahwa pembicara merasa posisi atau niat pihaknya, dalam hal ini

Kementerian Pertahanan (Kemenhan), telah disalahpahami atau disalahartikan. Kalimat “bahwa eh apa Kemenhan mau untuk mendengarkan gitu ya...” menyiratkan keinginan pembicara untuk meluruskan persepsi publik bahwa Kemenhan sebenarnya bersedia. Pemilihan kata seperti “kan ya, gitu ya, disalah-salahkan” menunjukkan gaya bahasa tidak langsung yang mengandung beban emosional. Penggunaan pengulangan dan keraguan (“eh apa... gitu ya...”) memperkuat kesan bahwa pembicara sedang berbicara dalam kondisi emosi campur aduk, antara defensif dan ingin menjelaskan. Dalam konteks komunikasi politik atau publik, tindak tutur ini dapat digunakan untuk mendapatkan simpati atau pemahaman dari audiens, dengan cara mengungkapkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pihak pembicara. Dengan mengekspresikan rasa “disalahkan”, pembicara berusaha mendekatkan diri secara emosional kepada audiens dan sekaligus menolak tuduhan yang diarahkan kepadanya. Davis & Garza (2023) menunjukkan bahwa ungkapan yang tampak informal atau bercanda malah memuat seruan implisit kepada pihak tertentu sebagai fungsi pragmatik seperti ajakan halus, menandakan ekspektasi publik agar segera bertindak atau mengoreksi sesuatu. Secara pragmatik, pernyataan ini bisa berdampak pada mengalihkan tuduhan dari pihak pembicara, membangun narasi bahwa Kemenhan bersikap terbuka, walau dianggap sebaliknya, meminta empati atau pengertian dari pendengar terhadap posisi yang dianggap dilemahkan.

Tindak Tutur Deklaratif

Data 8

Konteks tuturan yang terjadi antara Stefanus Pramono dan Husein Abri.

“Revisi undang-undang TNI dialihkan dari Baleg ke Komisi 1...”

Pernyataan ini merupakan tindak tutur deklaratif karena menyatakan perubahan status atau struktur resmi dalam proses legislasi, yakni pengalihan kewenangan pembahasan RUU dari satu lembaga ke lembaga lain. Tindak tutur deklaratif digunakan untuk mengubah status, posisi, atau kondisi suatu hal di dunia nyata melalui pengucapan itu sendiri. Dalam konteks ini, pernyataan tentang pengalihan pembahasan revisi UU TNI dari Baleg ke Komisi 1 DPR bukan hanya memberi informasi, tetapi juga mencerminkan keputusan resmi atau kebijakan institusional yang telah (atau sedang) diberlakukan. Kalimat ini memiliki dampak praktis terhadap proses legislasi dan dinamika politik di DPR, karena pengalihan tersebut mengubah jalur pembahasan undang-undang. Artinya, bukan hanya perubahan teknis, tetapi juga bisa menyiratkan adanya pergeseran kekuasaan, strategi politik, atau manuver kelembagaan. Secara linguistik, kalimat ini bisa terlihat informatif, tetapi dalam konteks tindak tutur deklaratif, fungsi pernyataan ini berdifat performatif karena menyatakan keputusan yang berdampak langsung pada proses legislasi. Otmakhova dan Frermann (2021) membahas bagaimana pernyataan dalam forum parlemen berfungsi sebagai speech act yang tidak hanya menginformasikan, tetapi juga mengpolitisi status institusional suatu isu. Pengalihan wewenang legislatif adalah tindakan deklaratif yang ikut membentuk lapangan politik. Dengan kata lain, pernyataan tersebut menandai bahwa suatu tindakan institusional telah (atau sedang) terjadi. Secara pragmatis, pernyataan ini memberi tahu audiens bahwa ada perubahan struktur formal dalam proses pembahasan undang-undang, dapat berfungsi sebagai penanda adanya dinamika politik internal yang mungkin tidak dinyatakan secara eksplisit, dan bisa menjadi awal dari narasi atau analisis yang lebih luas terkait arah dan motif di balik perubahan tersebut.

Data 9

Konteks tuturan yang terjadi antara Stefanus Pramono dan Fransisca Christy Rosana

"Pasal yang problematik itu sudah tidak ada."

Pernyataan ini merupakan bentuk tindak tutur deklaratif karena menyampaikan perubahan status hukum atau isi dokumen resmi, dalam hal ini penghapusan pasal yang dianggap problematik dari dokumen revisi undang-undang. Tindak tutur deklaratif terjadi ketika suatu ucapan secara langsung mengubah realitas institusional atau status suatu hal, atau menyatakan bahwa perubahan tersebut telah terjadi. Dalam kalimat ini, pernyataan bahwa "pasal yang problematik itu sudah tidak ada" secara langsung menyampaikan perubahan substansi hukum dalam dokumen resmi, yakni penghapusan atau pencoretan pasal tertentu. Sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Wicaksono (2021) menguatkan bahwa tindak tutur deklaratif memiliki kekuatan ilokusi untuk mengubah status sosial atau institusional langsung melalui tuturan, misalnya menyatakan "pasal sudah dicabut" sama halnya dengan realisasi hukum. Ucapan ini memiliki dampak pragmatis dalam komunikasi publik, yaitu menyampaikan klaim bahwa revisi telah dilakukan sesuai ekspektasi publik, berpotensi membatasi kritik lanjutan, karena publik diberi kesan bahwa substansi yang bermasalah tidak lagi relevan, menjadi alat klarifikasi atau pembelaan posisi lembaga yang sebelumnya dikritik.

Simpulan

Bahasa sebagai alat komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan memiliki fungsi melakukan tindakan sosial dengan maksud serta tujuan tertentu. Kajian pragmatik, khususnya tindak tutur ilokusi yang dikembangkan oleh Austin dan Searle, menjadi kerangka teoretis penting untuk memahami bagaimana makna dan fungsi ujaran dipengaruhi oleh konteks, niat penutur, dan respons pendengar. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa analisis tindak tutur ilokusi dapat mengungkap berbagai maksud komunikatif dalam interaksi verbal. Tindak tutur ilokusi yang banyak ditemukan dalam video ini adalah tindak tutur ilokusi asertif sejumlah 16 tindak tutur, tindak tutur ilokusi deklaratif sebanyak 14 tindak tutur, tindak tutur ilokusi direktif sebanyak 13 tindak tutur, tindak tutur ilokusi ekspresif sebanyak 6 tindak tutur, dan tindak tutur komisif sebanyak 5 tindak tutur. Tindak tutur ilokusi komisif menjadi tindak tutur yang paling sedikit jumlah tindak tutur dalam video Tempo.co tentang Revisi UU TNI. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana berbagai pihak yang terlibat dalam isu sensitif ini menggunakan bahasa secara strategis untuk menyampaikan pandangan, kritik, atau bahkan menyindir, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi opini publik. Dengan demikian, analisis pragmatik tindak tutur ilokusi dalam konteks publik menjadi penting untuk menjelaskan kompleksitas komunikasi di balik isu-isu politik dan hukum.

Daftar Pustaka

- Akbar, S. (2018). Analisis Tindak Tutur pada Wawancara Putra Nababan dan Presiden Portugal (Kajian Pragmatik). *SeBaSa*, 1(1), 27. <https://doi.org/10.29408/sbs.v1i1.792>.
- Al-Deen, J. I. S., Mirsaedi, A., Baqqal, L. H., & Najarzagdegan, J. (2024). Exploring the Pragmatic Features of Incitement in Political Texts: The Russia-Ukraine Crisis. *JNTELL*, 3(1), 144–157.

- Anggraeni, P. N., & Utomo, A. P. Y. (2021). Analisis Tindak Tutur Ekspresif Dilan dalam Film Dilan 1990. Logat: *Jurnal Bahasa Indonesia dan Pembelajaran*, 8(1), 27–40.
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.
- Austin, J. L. (1962). *How to Do Things with Words*. Oxford: Oxford University Press.
- Charoensukmongkol, P., & Liu, Y. (2022). *Metaphors as masks: Political sugar-coating and public perception*. *Discourse & Society*, 33(4), 395–412.
<https://doi.org/10.1177/09579265221087234>.
- Davis, A., & Garza, M. (2023). Implicit call-to-action: Undercurrents in informal public commentary. *Public Discourse Studies*, 11(1), 45–62.
- Kridalaksana, H. (2008). *Kamus Linguistik (Keempat)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kristianingsih, A. E., Astuti, S. P., & Tiani, R. (2023). Analisis tindak tutur ilokusi dalam video podcast Cerita Bibu pada kanal YouTube Obrolan Babibu. *Wicara*, 2(1), 43–52. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.
- Lee, S., Kim, H., & Park, J. (2022). Mitigated directives in democratic discourse: Navigating politeness and urgency. *Journal of Pragmatic Politeness*, 8(2), 101–118.
- Naila, A. N., Gultom, A. F., Septiani, A. P., Ulfa, M., Avrillia, W., & Putri, D. M. (2024). Framing Theory on Cyber Politic Analysis: Candidate for Governor of North Sumatera on Instagram. *Lexeme: Journal of Linguistics and Applied Linguistics*, 7(1), 75–80.
- Otmakhova, Y., & Frermann, L. (2021). Politicisation as a Speech Act: A Repertoire for Analysing Politicisation in Parliamentary Plenary Debates. In *Tracing the Politicisation of the EU* (pp. 67–90). Springer.
- Purba, A. (2011). Tindak Tutur dan Peristiwa Tutur. *Pena: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 1(1), 77–91. <https://online-journal.unja.ac.id/pena/article/view/1426>
- Putri, D. A. W., & Utomo, A. P. Y. (2021). Maksud Kata Makian pada Media Sosial Twitter (Kajian Pragmatik). *WIDYA ACCARYA : Jurnal Kajian Pendidikan FKIP Universitas Dwijendra*, 12(2), 162–176.
- Ramadhani, R. S., Asia, Y. A., & Haliq, A. (2025). Satire and Sarcasm in Government Fuel Policy Critique: A Pragmatic Analysis of Rian Fahardhi's TikTok Video. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(5), 1291–1299.
<https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i5.556>.
- Searle, John R. (1969). *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Taguchi, N., & Kadar, D. (2025). Illocutionary force and indirect speech in political discourse. *Journal of Pragmatics*.
- Tuti Hidayah, Rochmat Tri Sudrajat, dan D. F. (2020). Analisis Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi, Dan Perlokusi pada film "Papa Maafin Ris". *Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 3 Nomor 1, 71–80.
- Urbaningrum, T., Triana, L., & Sari, V. I. (2022). Tindak Tutur Ilokusi pada Youtube Nihongo Mantappu "Jika Aku Menjadi Menteri Pendidikan...." *Jurnal Ilmiah SEMANTIKA*, 3(02), 91–100.
<https://doi.org/10.46772/semantika.v3i02.593>
- Wicaksono, G. A. (2021). An Analysis of Declarative Speech Act in The Movie My Lawyer, Mr Jo: Pragmatics Approach. *Journal of English Language Studies*, 3(1), 91–100.

- Widyawati, Neni dan Asep Purwo Yudi Utomo. 2020. "Tindak Tutur Ilokusi dalam Video Podcast Deddy Corbuzier dan Najwa Shihab pada Media Sosial Youtube". *Jurnal Ilmiah Telaah*. Vol. 5, No. 2. Juli 2020: 18-27.
- Wulandari, E., & Utomo, A. P. Y. (2021). Analisis Tindak Tutur Representatif Dalam Video "Trik Cepat Jawab Soal Matematika Bahasa Inggris Versi Jerome!" Pada Saluran Youtube Jerome Polin. *Jurnal Sastra Indonesia*, 10(1), 65-70. <https://doi.org/10.15294/jsi.v10i1.45120>.